



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemutakhiran data kode desa dan data wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa perubahan nama Desa sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Mandailing Natal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Bukit Malintang, Panyabungan Utara, Panyabungan Timur, Panyabungan Selatan, Panyabungan Barat, Lembah Sorik

Marapi, Tambangan, Ulu Pungkut dan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2002 Nomor 7 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemekaran Desa di Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2002 Nomor 8 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Hutabargot, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Pakantan dan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2007 Nomor 10 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pemecahan Desa di Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2007 Nomor 17 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2007 Nomor 19 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pemecahan Desa di Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2007 Nomor 45 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Naga Juang di Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2007 Nomor 46 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
4. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
9. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Memberikan kepastian hukum tentang Administrasi Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal;
 - b. Meningkatkan pelayanan publik kepada warga masyarakat Desa dan Kelurahan guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
 - c. Memberdayakan masyarakat agar mampu menemukenali serta menggali potensi Desa dan Kelurahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta melestarikan hasil hasil pembangunan;
 - d. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan;

Pasal 3

Daftar Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal untuk setiap Desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

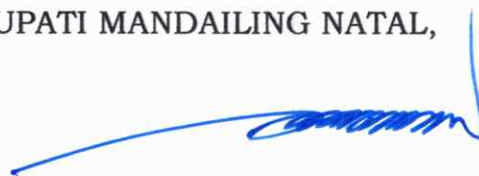
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan

Pada tanggal 2022

BUPATI MANDAILING NATAL,



MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan

Pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,



GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR